

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sebanyak 17.504 pulau dengan wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer atau lebih dari 70 persen luas seluruh wilayah Indonesia, namun masyarakat nelayannya merupakan golongan masyarakat miskin. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan miskin di Indonesia sebanyak 2,7 juta. Begitupun hasil produksi nelayan sebanyak 6,4 juta ton per tahun. Diasumsikan bahwa per nelayan mampu menangkap 2 ton per tahun, dengan begitu berarti dalam sehari nelayan mampu menangkap ikan berkisar 3 kilogram. Jika diuangkan dengan hasil tangkap 3 kilogram per hari maka pendapatan nelayan dalam sehari rata-rata berkisar Rp 50.000,00-Rp 100.000,00 (<http://Indomaritime-institute.org>., diakses pada tanggal 1 Januari 2014).

Kondisi ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Jumlah 7,87 juta orang tersebut berasal dari sekitar 10.640 desa miskin yang terdapat di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air (rata-rata

berpenghasilan tidak lebih dari Rp 500.000,- per bulan). Pendapatan nelayan tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia, yaitu sebesar Rp 520.000,- per kapita/bulan (<http://news.-liputan6.com>., diakses pada tanggal 19 Januari 2014).

Keadaan ini diperparah dengan inflansi pada Januari 2014 yang mencapai 1,07% dan cukup memukul masyarakat kelas bawah, terutama para nelayan (<http://bisniskeuangan.kompas.com>., diakses pada tanggal 6 Februari 2014). Penderitaan nelayan tidak hanya berhubungan dengan masalah cuaca saja, namun juga berkaitan dengan larangan konsumsi jenis BBM tertentu untuk kapal di atas 30 GT (surat BPH Migas No. 29/07/KA.BPH/2014 Tanggal 15 Januari 2014). Tentu saja hal ini memperparah masyarakat nelayan untuk memperoleh kesejahteraan hidupnya dalam memanfaatkan sumberdaya laut sebagai mata pencaharian pokok.

Adapun upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakberdayaan yang dialami para nelayan tersebut adalah melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang berbasis industrialisasi perikanan melalui Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Industrialisasi perikanan yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2012 pada prinsipnya juga bertujuan untuk mempercepat peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya, pemasar, dan petambak garam. Selain itu, pemerintah juga membentuk Departemen Perikanan dan Kelautan serta melaksanakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang

telah dilaksanakan sejak tahun 2001 sebagai wujud kepedulian pemerintah pada masyarakat pesisir, termasuk nelayan dalam pengentasan masalah kemiskinan (Kusnadi, 2008).

Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan program peningkatan kehidupan nelayan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar di 10.640 desa di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di sektor kelautan dan perikanan. Namun program-program tersebut belum memberikan hasil maksimal bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Program-program tersebut juga harus didampingi oleh program lainnya, misalnya peningkatan subsidi bahan bakar minyak untuk kalangan nelayan. Jatah BBM subsidi yang akan diluncurkan pemerintah kepada nelayan pada tahun 2014 ini perlu ditingkatkan lagi. Begitu juga dengan alat tangkap berupa jaring dan kapal, pemerintah perlu mendorong perbanyak alat tangkap dan kapal nelayan (<http://agroindonesia.co.id>., diakses pada tanggal 26 April 2014).

Selain itu, Afrida (2005) mengemukakan bahwa program pembangunan dan pengembangan kenelayan yang dirancang maupun yang telah dilaksanakan masih bersifat teknik produksi dan lebih cenderung berorientasi pada ekspor, sehingga dalam banyak hal lebih menguntungkan nelayan yang bermodal (*juragan*) maupun perusahaan-perusahaan perikanan. Untuk memudahkan nelayan memasarkan hasil tangkapannya, pemerintah sebaiknya memperbanyak pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di daerah-daerah pesisir. Hal ini dimaksudkan agar nelayan dapat dengan mudah menjual hasil tangkapannya.

Pemerintah juga perlu membatasi penguasaan asing di sektor perikanan dalam negeri dengan membuat sejumlah kebijakan pemerintah yang memberikan batasan-batasan kepada pihak asing di sektor perikanan, misalnya saja tentang pembatasan kapal ikan asing dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Begitu juga dengan program-program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan anak nelayan, keterampilan istri dan keluarga nelayan perlu ditingkatkan lagi sehingga keluarga nelayan di Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya (<http://agroindonesia.co.id>., diakses pada tanggal 26 April 2014).

Berdasarkan beberapa program di atas, pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Namun hal ini justru menimbulkan persoalan baru diantara pemerintah dan masyarakat nelayan. Persoalan yang dimaksud adalah terjadinya kesenjangan hubungan fungsional antara pemerintah (negara) dan masyarakat nelayan akibat dari kebijakan pembangunan pemerintah yang tidak memihak kepada sektor kemaritiman (Kusnadi, 2008).

Menurut Kusnadi (2006), salah satu sumberdaya yang terabaikan dalam upaya pembangunan nasional saat ini adalah bidang kelautan dan perikanan, padahal bidang kelautan dan perikanan ini dapat menyumbangkan hasil yang sangat besar dengan potensi ekonomi pasar yang semakin berkembang pesat. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang strategis untuk dijadikan sumber pertumbuhan baru bagi bangsa Indonesia agar bisa keluar dari permasalahan ekonomi. Hal ini didukung oleh beberapa alasan utama, yaitu (1) secara fisik Indonesia adalah

negara kepulauan terbesar di dunia, (2) di wilayah pesisir dan lautan yang sangat luas itu terdapat potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang beraneka ragam sebagai potensi pembangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi permasalahan ekonomi, ketertinggalan, kemiskinan nelayan, pembudidaya ikan, serta rakyat Indonesia. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan permasalahan dapat diatasi secara bertahap, maka hal tersebut dapat menjadi solusi untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai andalan pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan (Kurniawan, 2009).

Upaya untuk memanfaatkan peluang dan prospek di sektor kelautan dan perikanan tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran nelayan dalam mengelola potensi sumberdaya perikanan dan kelautan. Nelayan merupakan orang yang sangat mengenal keadaan laut dan mengetahui bagaimana cara mengelolanya. Namun hal ini terhambat pada proses pengelolaannya karena untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan, dibutuhkan modal yang besar serta keahlian dalam menaklukkan keadaan alam yang tak menentu. Apabila nelayan tradisional diberdayakan, maka potensi sumberdaya perikanan dan kelautan dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam usaha pembangunan nasional.

Di Indonesia, sebagian besar nelayannya dikategorikan sebagai nelayan tradisional dan nelayan buruh (Kusnadi, 2007). Padahal mereka merupakan pemasok utama produksi perikanan nasional. Meskipun demikian, posisi sosial nelayan masih marjinal. Meski nelayan sebagai produsen, namun pendapatan yang

diperoleh tidaklah besar. Bila masyarakat nelayan diperhatikan kesejahteraannya maka pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dapat secara optimal dimanfaatkan untuk menambah pendapatan, baik bagi rumahtangga nelayan itu sendiri maupun bagi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Bagi nelayan tradisional, musim paceklik tidak hanya memperlama masa kesulitan mereka dalam memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga menyebabkan kehidupan mereka menjadi semakin miskin, dan mereka terpaksa masuk dalam perangkap hutang yang tidak berkesudahan. Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan menggunakan alat tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana (Kusnadi, 2008). Keterbatasan kemampuan nelayan-nelayan tradisional dalam berbagai aspek, khususnya penguasaan alat tangkap yang serba terbatas adalah hambatan potensial bagi para nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan yang membelit mereka selama ini. Dalam banyak kasus, nelayan tradisional yang miskin umumnya lebih memilih menerima nasib dan berusaha beradaptasi dengan kondisi kemiskinan yang membelenggunya daripada berusaha menyiasatinya.

Ketidakberdayaan yang dialami oleh nelayan tradisional tersebut menyebabkan penghasilannya menjadi tidak menentu dan tidak mampu menghadapi gejala alam yang buruk dengan peralatan sederhana. Ditambah lagi dengan adanya musim paceklik yang membuat keadaan nelayan secara ekonomi semakin memburuk. Berbagai studi mengenai masyarakat nelayan membuktikan bahwa kehidupan masyarakat pesisir, khususnya keluarga nelayan, tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Rendahnya keterampilan nelayan

untuk melakukan diversifikasi penangkapan dan keterikatan yang kuat terhadap pengoperasian satu jenis alat tangkap, juga berkontribusi terhadap timbulnya kemiskinan nelayan (Kusnadi, 2008). Apabila pada musim tertentu jenis ikan yang biasa ditangkap oleh satu jenis alat tangkap tidak ada, maka nelayan tidak bisa berbuat banyak. Dengan demikian, diversifikasi penangkapan (alat tangkap) adalah salah satu upaya yang juga bisa dilakukan untuk membantu nelayan dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Modernisasi perikanan yang berdampak serius terhadap proses pemiskinan telah menempatkan kaum perempuan sebagai penanggungjawab utama kelangsungan hidup rumahtangga nelayan (Kusnadi, 2008). Posisi laki-laki dan perempuan dalam rumahtangga nelayan dapat dikatakan sebagai pelengkap (komplementer), dimana laki-laki bekerja di laut untuk menangkap ikan, sedangkan perempuan memasarkan hasil tangkapan di daratan. Perempuan pun dapat melakukan kegiatan lain seperti arisan, kegiatan pengajian yang berdimensi ekonomi, dan simpan pinjam atau apapun yang bisa membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan disebabkan karena masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras dan selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Kondisi inilah yang mengakibatkan nelayan dijauhi oleh institusi-institusi perbankan dan perusahaan asuransi, seperti sulitnya masyarakat nelayan mendapatkan akses pinjaman modal, baik untuk modal kerja maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Solihin, 2004). Menurut Dhani (2010), ada tiga faktor penyebab kemiskinan pada rumahtangga nelayan, yaitu (1) kemiskinan alamiah (meliputi keadaan musim

atau cuaca, ketersediaan sumberdaya laut, akses dalam memperoleh sumberdaya laut), (2) kemiskinan struktural (meliputi jumlah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anggota keluarga, jumlah anak, dan akses dalam memperoleh bantuan dana), dan (3) kemiskinan kultural (meliputi malas, pasrah, tergantung pada musim, tidak ada penganekaragaman usaha, serta tidak ada upaya pemanfaatan waktu).

Kawasan pesisir pantai Bandar Lampung kini sedang mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan lantaran rencana pemerintah kota untuk menata kawasan tersebut. Selain itu, kawasan pesisir pantai ini juga terhitung sangat padat dan merupakan kawasan yang dikategorikan sebagai kantong kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung. Indikator kemiskinan tersebut baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.

Hal ini dapat dilihat dari bentuk bangunan rumah dan lingkungannya. Permukiman warga di pesisir pantai ini sangat berbeda dibandingkan permukiman warga yang bukan berada di pesisir. Kepadatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan kelurahan nonpesisir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2014, mencatat penduduk miskin kota di Provinsi Lampung adalah 230.630 jiwa atau sebesar 11,08% dengan garis kemiskinan Rp 336.927/kapita/bulan, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1.85%, dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0.44%.

Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras adalah salah satu kelurahan yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan di Kota Bandar Lampung. Lokasi wilayahnya yang terletak di sepanjang Teluk Lampung menjadikan

kelurahan ini menjadibagian dari wilayah pemasok biota laut, khususnya ikan di Kota Bandar Lampung. Kelurahan Sukaraja merupakan bagian dari wilayah perkotaan yang merupakan pusat dari segala kegiatan, baik itu perdagangan, pendidikan, transportasi, rekreasi, jasa, dan sebagainya. Hal ini menarik perhatian dari masyarakat luar daerah untuk tinggal dan menetap di daerah tersebut(tidak hanya bagi masyarakat yang berasal dari Lampung tetapi juga dari luar Lampung).

Jumlah penduduk Kelurahan Sukaraja berjumlah 12.081 orang, masing-masing adalah jumlah laki-laki sebanyak 5.690 orang dan jumlah perempuan sebanyak 6.391 orang. Sedangkan kepala keluarga di Kelurahan Sukaraja berjumlah 3.177 orang.

**Tabel 1. Distribusi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan**

No.	Angkatan Kerja	Jumlah
1.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	87
2.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumahtangga	1.259
3.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1.348
4.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak menentu	6.214
5.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	8

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2013

Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) di Kelurahan Sukaraja menunjukkan bahwa sebesar 1.348 orang yang bekerja penuh (8 jam perhari) dan 6.214 orang yang bekerja tidak menentu. Adapun penduduk angkatan kerja lainnya yang belum dan tidak bekerja karena masih sekolah (sebanyak 87 orang), sebagai ibu rumahtangga (sebanyak 1.259 orang), dan cacat (sebanyak 20 orang). Oleh karena itu, dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kelurahan Sukaraja pada umumnya bekerja tidak menentu.

**Tabel 2. Distribusi Penduduk Kelurahan Sukaraja Menurut Kesejahteraan Keluarga**

No.	Tingkat Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1.	Jumlah keluarga prasejahtera	945
2.	Jumlah keluarga sejahtera 1	448
3.	Jumlah keluarga sejahtera 2	554
4.	Jumlah keluarga sejahtera 3	492
5.	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	13

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2013

Akibat dari pendapatan masing-masing keluarga yang bervariasi maka tingkat kesejahteraan keluarga pun akan beragam. Hal ini dapat dilihat di dalam tabel 2 kesejahteraan keluarga yang menyebutkan bahwa jumlah terbanyak dari 2.452 keluarga adalah jumlah keluarga prasejahtera, yaitu sebanyak 945 keluarga. Selanjutnya secara berurutan adalah jumlah keluarga sejahtera 1 sebanyak 448 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 2 sebanyak 554 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 3 sebanyak 492 keluarga, jumlah keluarga 3 plus sebanyak 13 keluarga.

Adapun jenis-jenis mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sukaraja dapat dilihat pada Tabel 3. Diketahui, ada 35 jumlah jenis mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Sukaraja, salah satunya adalah nelayan (berjumlah 81 orang), sedangkan mata pencaharian yang berjumlah paling banyak didominasi oleh masyarakat Sukaraja adalah sebagai buruh migran perempuan (berjumlah 3.722 orang) dan buruh migran laki-laki (berjumlah 3.713 orang). Adapun masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap adalah sebanyak 243 orang. Hal ini membuktikan bahwa produktivitas masyarakat di Kelurahan Sukaraja belum berjalan secara optimal dan tentu saja membutuhkan perhatian dari semua pihak, khususnya pemerintah.

**Tabel 3. Distribusi Penduduk Kelurahan Sukaraja Menurut Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh tani	278
2.	Pegawai negeri sipil	57
3.	Pengrajin industri rumahtangga	54
4.	Pedagang keliling	60
5.	Peternak	7
6.	Nelayan	81
7.	Montir	10
8.	Perawat swasta	1
9.	Pembantu rumahtangga	392
10.	TNI	2
11.	POLRI	7
12.	Sopir	65
13.	Pengusaha kecil dan menengah	54
14.	Jasa pengobatan alternatif	2
15.	Karyawan perusahaan swasta	444
16.	Karyawan perusahaan pemerintah	70
17.	Guru swasta	4
18.	Pensiunan TNI/POLRI	50
19.	Pensiunan PNS	289
20.	Pensiunan swasta	102
21.	Buruh migran perempuan	3.722
22.	Buruh migran laki-laki	3.713
23.	Jasa penyewaan peralatan pesta	5
24.	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	10
25.	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	25
26.	Pemilik usaha informasi dan komunikasi	30
27.	Buruh usaha informasi dan komunikasi	30
28.	Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	8
29.	Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	52
30.	Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	15
31.	Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	370
32.	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	57
33.	Wiraswasta lainnya	198
34.	Dukun/paranormal/supranatural	1
35.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	243

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2013

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Sukaraja didapatkan informasi bahwa banyak pendatang berasal dari luar daerah Lampung, seperti dari Banten, Palembang, dan lain-lain yang menempati daerah tersebut dan bermata-pencarian sebagai nelayan. Pada umumnya, penduduk pendatang yang menetap dan mencari kerja di kota adalah untuk memperbaiki taraf hidupnya supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi, keadaan kota yang semakin padat dan tidak mampu menampung penduduk pendatang yang kian meningkat membuat mereka harus hidup seadanya dengan tempat tinggal yang tidak layak huni. Selain itu, mereka juga tidak memiliki keahlian atau kemampuan untuk berwirausaha sehingga mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan akhirnya menjadi pekerja di sektor informal.

Kehidupan masyarakat nelayan di Kelurahan Sukaraja ini merupakan salah satu gambaran kehidupan nelayan kota yang masih menggunakan cara tradisional dalam melaut, atau yang biasa disebut dengan *nelayan payang*. *Nelayan payang* adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring tarik atau yang dikenal dengan istilah *jaring seret* atau *kreket*. Efektivitas penangkapan dengan menggunakan jaring ini telah diadopsi secara turun-temurun dari tradisi nenek moyang orang Melayu di Sumatera (Kurniawan, 2009).

Kehidupan masyarakat nelayan memang pada umumnya merupakan kelompok masyarakat dengan persentase kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari permukiman yang padat, modal dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan dalam melaut masih terbatas. Keadaan ini diperparah dengan harga bahan bakar untuk melaut dan kebutuhan pokok yang semakin lama semakin naik juga menjadi tekanan bagi masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan

rumahtangganya. Persoalan cuaca yang sulit diprediksi juga sudah menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat nelayan.

Begitupun dengan masyarakat nelayan di Kelurahan Sukaraja yang tercatat sebagai rumahtangga miskin sesuai dengan standar kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS dan menerima bantuan beras miskin (*raskin*) setiap bulan. Ketika bantuan *raskin* yang dibagikan dari pemerintah tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan rumahtangga nelayan di Kelurahan Sukaraja, maka nelayanpun harus melakukan strategi-strategi untuk menjaga kelangsungan hidup rumahtangganya agar kebutuhannya bisa tetap terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya yang meliputi sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, bahan bakar minyak, dan transportasi, tentunya harus dengan melakukan tindakan rasional. Tindakan rasional tersebut merupakan strategi nelayan tradisional dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada, baik yang berasal dari nelayan itu sendiri maupun dari sumberdaya lingkungan dan sistem sosial yang ada.

Beberapa strategi dapat dilakukan di kelurahan Sukaraja, melihat potensi yang tersedia sangat memungkinkan untuk melakukan beberapa strategi bertahan hidup bagi masyarakat nelayan miskin yang sedang menghadapi paceklik. Kelurahan Sukaraja yang terletak di dekat pusat kota yang memiliki bermacam-macam usaha mikro, perbankan, dan yang lainnya memungkinkan untuk nelayan melakukan pekerjaan lain yang bisa menambah pendapatan rumahtangganya. Tidak hanya nelayan saja yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan lain selain melaut, anggota keluarga yang lainnya pun memiliki peluang untuk ikut serta menambah pendapatan keluarganya. Strategi dengan melakukan pekerjaan lain selain sebagai

nelayan dan mengikutsertakan anggota keluarga dalam usaha menambah pendapatan keluarga biasa disebut dengan diversifikasi pekerjaan.

Diversifikasi pekerjaan ini akan berjalan optimal bila disertai dengan jaringan sosial. Jaringan sosial dapat memperkuat hubungan nelayan dengan orang-orang yang dekat dengan pekerjaannya. Selain memungkinkan mendapatkan pekerjaan sampingan, jaringan sosial juga membuka peluang kepada rumahtangga nelayan untuk berhutang ketika kondisi sedang terdesak. Jaringan sosial ini sangat bisa dilakukan karena masyarakat nelayan berada pada lingkungan sosial yang tersusun dengan bermacam-macam etnis dan tingkatan kenelayanan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Jaringan sosial dapat memperluas hubungan kerja dan menambah pendapatan rumahtangga. Pada musim paceklik tiba, sesama nelayan (antara juragan-buruh maupun buruh-buruh) dapat saling menawarkan sarana ketika salah satu memiliki solusi yang dapat membantu nelayan yang lain. Tidak hanya itu, anggota keluarga yang lain dapat terlibat dalam usaha menambah pendapatan saat tersedianya peluang yang ditawarkan oleh salah satu jaringan yang dimilikinya. Tidak hanya itu, mereka juga dapat memanfaatkan fasilitas perkreditan yang ditawarkan oleh organisasi formal maupun lembaga perbankan yang ada di sekitar tempat tinggalnya untuk tetap memenuhi kebutuhan rumahtangganya ketika musim paceklik tiba. Bila strategi di atas dirasakan belum mampu mencukupi kebutuhan rumahtangga, maka strategi berhutang merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan oleh rumahtangga nelayan miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Oleh karena itu, dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas sangat menarik untuk diketahui, antara lain bagaimana strategi bertahan hidup rumahtangga nelayan miskin di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalahnya adalah bagaimana strategi bertahan hidup rumahtangga nelayan miskin di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi bertahan hidup nelayan miskin di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran secara komprehensif tentang kehidupan masyarakat nelayan saat ini dengan segala permasalahannya sehingga dapat menambah wawasan di bidang ilmu sosial, terutama sosiologi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
3. Menambah wawasan pembaca tentang kehidupan rumahtangga nelayan miskin dan strategi bertahan hidupnya.